

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Di Kantor Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Mia Aprilia Saputri¹, Sunariyanto², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: miaapriliasaputri851@gmail.com*

ABSTRAK

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa berarti warga desa aktif terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian proyek pembangunan. Keterlibatan ini mencakup kontribusi tenaga, ide, bahan, Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan dan Dampaknya terhadap Keberhasilan serta Keberlanjutan Inisiatif Desa Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keterlibatan tersebut dalam pembangunan desa. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan dari Desa Mulyo Agung menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif, dipengaruhi oleh pendidikan, kebijakan pemerintah, dan tradisi lokal, memainkan peran penting dalam keberhasilan upaya pembangunan. Faktor internal seperti pengetahuan dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti kebijakan dan akses informasi, sangat penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Pengelolaan yang efektif terhadap faktor-faktor ini oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan partisipasi dan dampak positif pembangunan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Desa

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan berbagai proyek pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi mencerminkan keterlibatan aktif Warga terlibat dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan desa. Wibowo (2004) menyarankan bahwa partisipasi mencakup keterlibatan aktif semua warga dalam berbagai tahap penting penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, seperti yang dijelaskan oleh Hetifah dan Histiraludin (dalam Handayani, 2006), mencakup keterlibatan masyarakat secara sukarela dan aktif tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Keterlibatan ini sangat penting dalam membangun kohesi sosial dan memupuk rasa memiliki terhadap program pembangunan yang dijalankan. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi tiga tradisi utama: partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Setiap tradisi ini menekankan aspek yang berbeda dan menggunakan indikator yang berbeda, namun

semuanya bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Slamet (2003) menyoroti bahwa partisipasi masyarakat Ini sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan pembelajaran sosial, tetapi juga untuk...mobilisasi sosial yang dapat mempercepat pembangunan desa. Keberhasilan suatu desa dalam mencapai kemajuan sangat bergantung pada seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat lokal, karena pemahaman dan pengalaman mereka yang mendalam tentang lingkungan sekitar, sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal kebutuhan.

Namun, meskipun pentingnya partisipasi masyarakat telah diakui, masih terdapat berbagai hambatan yang seringkali mengurangi efektivitas partisipasi ini. Kesibukan masyarakat, sikap apatis, serta pemahaman yang keliru mengenai bantuan pemerintah sering kali menjadi penghambat utama. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan desa, serta edukasi yang benar tentang pentingnya partisipasi aktif dan semangat gotong royong dalam penggunaan dana desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara masyarakat terlibat dalam proses pembangunan desa?
2. Apa saja faktor yang dapat mendukung atau menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?

Tujuan Penelitian

1. Untuk memeriksa bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan desa.
2. Untuk menentukan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Manfaat penelitian

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat praktis bagi Kantor Desa Mulyo Agung di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, serta untuk kantor kecamatan lainnya.

Tinjauan Pustaka

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan aspek penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses pembangunan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2020) di Desa Sungai Jalu, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, partisipasi masyarakat memengaruhi berbagai tahapan. Meskipun usaha telah dilakukan, keterlibatan masyarakat di desa masih belum ideal, menyoroti kesulitan dalam melibatkan penduduk secara aktif.

Dalam studi mereka pada tahun 2018 mengenai Desa Makeruh, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Welasari dan Ardiensyah mengidentifikasi empat indikator utama partisipasi: kontribusi dalam pengambilan keputusan, dukungan finansial swadaya, keterlibatan dalam kegiatan bersama, dan pemeliharaan hasil pembangunan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat relatif baik, dengan total skor 2659 dan persentase 66,54%. Studi ini menekankan bahwa meskipun pendekatan metodologis yang berbeda digunakan, baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya menyoroti faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Demikian pula, studi Yuni Kurnyati pada tahun 2019 di Desa Mulyorejo, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa cukup memuaskan. Penelitian

ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat di berbagai tahap pembangunan desa sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan.

Sebaliknya, penelitian oleh Ecin Sante, Vecky Masinambow, dan Jacline Sumual (2023) di Desa Tabulo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan masih sangat rendah, dengan skor rata-rata hanya 34,42%. Studi ini menyoroti bahwa meskipun keterlibatan masyarakat memiliki dampak positif terhadap pembangunan desa, tingkat partisipasi yang rendah merupakan kendala signifikan dalam mencapai hasil yang optimal.

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan bidang yang mengorganisir dan mengkoordinasikan sumber daya dan personel untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik. Menurut Chandler dan Plano, sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2010), administrasi publik adalah proses yang kompleks yang melibatkan kerja sama antara berbagai lembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan tujuan memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Harbani Pasolong (2010) menambahkan bahwa administrasi publik juga melibatkan aspek teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan responsivitas kebijakan publik terhadap kebutuhan sosial.

Keban (2008) menyatakan bahwa administrasi publik memainkan peran penting sebagai agen pemerintah yang berkuasa dalam mengatur dan mengambil inisiatif untuk kepentingan masyarakat, di mana masyarakat sering kali dipandang sebagai pihak yang pasif. Herbert Simon, dalam Pasolong (2010), mengidentifikasi beberapa prinsip administrasi yang dapat meningkatkan efisiensi, seperti spesialisasi tugas dan pembatasan jarak pengawasan dalam organisasi.

Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, yang tidak hanya berperan sebagai alat untuk meningkatkan kohesivitas sosial tetapi juga untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan (Pelling, 1998). Partisipasi juga dapat diidentifikasi sebagai peran serta dalam berbagai tahapan proyek pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, yang berkontribusi pada keberhasilan pembangunan (Gow & Vansant, 1983).

Konsep partisipasi telah diimplementasikan secara luas sejak tahun 1970-an, terutama dalam konteks pembangunan pedesaan dan pemerintah. Partisipasi komunitas dapat diperkuat

oleh modal sosial, meskipun hal ini masih membutuhkan bukti empiris lebih lanjut (Midgley & Hall, 2004). Hetifah, dalam Handayani (2006), mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan sukarela masyarakat tanpa tekanan eksternal, yang esensial dalam setiap program pengembangan masyarakat

Tiga Tradisi Konsep Partisipasi

Menurut Valderama dalam Slamet (2003), terdapat tiga tradisi utama partisipasi yang relevan dengan kemajuan masyarakat demokratis: partisipasi politik, sosial, dan warga. Partisipasi politik melibatkan keterlibatan individu dalam kegiatan pemerintahan dan proses politik, seperti pemungutan suara, berkampanye, dan mencalonkan diri untuk jabatan publik. berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, sementara partisipasi sosial lebih berorientasi pada keterlibatan masyarakat dalam siklus proyek pembangunan. Partisipasi warga, di sisi lain, menekankan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembuatan kebijakan.

Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat tidak hanya penting sebagai tujuan sosial, tetapi juga merupakan elemen integral dalam proses pembangunan itu sendiri. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta memastikan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme. Tujuannya adalah untuk menyelidiki kondisi alamiah dari objek yang diteliti, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui triangulasi, yaitu dengan menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan menyeluruh. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, yang berfokus pada identifikasi pola dan makna daripada sekadar membuat generalisasi. Penelitian ini pada akhirnya menekankan pemahaman makna mendalam dari data dibandingkan hanya membuat generalisasi yang luas (Sugiyono, 2017: 9).

Pembahasan

Bentuk partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan mempertimbangkan aspek sosial,ekonomi dan budaya.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan konsep penting yang menekankan pada keterlibatan aktif warga dalam

proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi proyek pembangunan. Menurut Conyers (2000:155), Melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting untuk mengumpulkan wawasan mengenai kondisi dan pandangan lokal, yang membantu memastikan bahwa proyek pembangunan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencerminkan perspektif mereka diterima oleh masyarakat, dan memenuhi hak demokrasi untuk dilibatkan dalam pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan keberhasilan proyek pembangunan tetapi juga sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan desa.

1. Tingkat intensitas intensitas partisipasi, dari kontribusi sederhana Hingga keterlibatan aktif dalam setiap tahap Pembangunan.

Tingkat dan Jenis Partisipasi Arnstein (1969) dalam teorinya tentang “Tangga Partisipasi” mengidentifikasi bahwa partisipasi dapat bervariasi mulai dari tingkat yang sangat rendah seperti manipulasi hingga tingkat yang sangat tinggi seperti kontrol warga. Tingkat partisipasi ini penting karena semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi proyek, semakin besar kemungkinan keberhasilan dan keberlanjutan proyek tersebut. White (1996) juga mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi mulai dari nominal hingga transformasional, di mana partisipasi transformasional menciptakan perubahan dalam struktur kekuasaan dan sosial yang ada.

2. Faktor yang mempengaruhi Tingkat partisipasi, seperti Tingkat Pendidikan,struktur sosial dan kebijakan pemerintah

Elemen-elemen yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Aspek sosial dapat melibatkan rasa kesatuan dan kepercayaan dalam komunitas, aspek ekonomi mencakup sumber daya dan kesehatan finansial, sementara aspek politik berhubungan dengan kualitas tata kelola dan dukungan kebijakan terkait, termasuk tingkat pendidikan, struktur sosial, dan kebijakan pemerintah. Menurut teori “Human Capital” oleh Gary Becker, pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Teori “Social Capital” oleh Pierre Bourdieu juga menekankan pentingnya

jaringan sosial dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Selain itu, kebijakan pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh teori "Public Policy", dapat mempengaruhi tingkat partisipasi melalui regulasi dan program yang mendorong atau menghambat keterlibatan masyarakat.

Faktor penghambat dan pendukung partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa dengan Faktor penghambat dan pendukung partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan desa dengan fokus pada dinamika interaksi antara faktor-faktor tersebut pada dinamika interaksi antara faktor-faktor tersebut Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mencakup elemen internal dan eksternal. Watson (dalam Soetomo, 2008) menyoroti bahwa ketergantungan individu dapat menjadi penghambat partisipasi. Faktor internal seperti tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, serta keterlibatan organisasi lokal, sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Faktor eksternal termasuk dukungan dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan konsultan yang memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi.

Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan Robert Chambers menekankan pentingnya "putting the last first" dalam konteks pembangunan pedesaan, di mana peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat menjadi kunci partisipasi yang efektif. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dan organisasi lokal dapat memberdayakan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses pembangunan. Paulo Freire juga menekankan pentingnya pendidikan kritis yang membebaskan individu untuk berpikir kritis dan bertindak secara kolektif, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kesimpulan

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat adalah kunci penting dalam pembangunan Desa Mulyoagung. Partisipasi yang bervariasi telah memperkuat inklusivitas dan rasa memiliki terhadap proses pembangunan. Namun, partisipasi belum merata, sehingga diperlukan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan, keterampilan, dan organisasi, serta faktor eksternal seperti kebijakan, akses informasi, dan peran lembaga pembangunan.

Norma budaya juga berperan penting, baik sebagai pendorong maupun penghambat. Pendekatan holistik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa.

Saran

1. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan: Tingkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman mereka terhadap program pembangunan.
2. Perluasan Akses Informasi: Sediakan akses informasi yang relevan melalui platform komunikasi yang efektif seperti internet desa atau sesi informasi rutin. Penguatan Organisasi Lokal: Dukung peran organisasi lokal sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, serta untuk memobilisasi sumber daya lokal.
3. Peningkatan Transparansi dan Keterlibatan: Dorong transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
4. Promosi Nilai Gotong Royong: Galakkan nilai gotong royong untuk meningkatkan tanggung jawab kolektif dan solidaritas dalam pembangunan desa.
5. Inklusi Gender dan Generasi: Pastikan partisipasi mencakup semua kelompok, termasuk perempuan dan generasi muda, untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan.
6. Peningkatan Sosialisasi oleh Pemerintah Desa: Tingkatkan kesadaran dan partisipasi aktif warga melalui sosialisasi dan dorongan dari pemerintah desa.

Daftar Pustaka

SUMBER BUKU :

- Adisasmita, R. (2006.). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta.: Graha Ilmu.
- Afiffuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung.: Alfabeta.
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT Gramedia Pustaka.
- Dwiningrum, S. I. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handayani, S. (2006). *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama)*. Surakarta: Kompip Solo.
- Isbandi, R. A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press.
- Miles, M. D. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang metode-Metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2002)). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Prastowo, A. ((2011)). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Slamet, M. (2003). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Supriady, D. D. (2005). *Perencanaan Pembangunan Derah*. Jakarta: SUN.
- Suryono, A. (2001). *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press.
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University.

SUMBER JURNAL :

- Ardieansyah, W. D. (2018). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKATDALAM PEMBANGUNAN DESA MAKERUH KECAMATAN RUPATKABUPATEN BENGKALIS. *Respon Publik*, 259-272.
- Ananda, F. (2020). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR.
- Ecin Santel, V. A. (2023). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA. *Respon publik*, 109-120.
- Kurniati, Y. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

- DESA DI DESA MULYOREJO 1 KECAMATAN BUNGAN MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA . Skripsi 2019.
- Sunariyanto, Y. C. (2021). KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TERHADAP BANTUAN DESA DI MASA (Studi Kasus Desa Kebangsaan Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo). *Respon Publik*, 26-33.
- Tumbel, S. M. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Respon publik*, 161029

SUMBER PERUNDANG -UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

SUMBER WEBSITE :

- [https://id.wikipedia.org/wiki/Mulyoagung, Dau, Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Mulyoagung,_Dau,_Malang)
- <http://mulyoagung-malangkab.desa.id/organisasi/detail?nid=17857>